



ANALISIS KOMPARASI ALOKASI ANGGARAN KONVENSIONAL VS SYARIAH

Arum Indiharwati

STAI Daruttaqwa Gresik
arumindiharwati@gmail.com

Amirul Fatihin

STAI Al-Hidayat Lasem Rembang Indonesia
amirul_f@staialhidayatlasem.ac.id

Abstrak: Kebijakan keuangan publik yang merupakan bagian penting dari perekonomian dan masih jarang dibahas dalam berbagai literatur ekonomi Islam adalah konsep penganggaran. Menarik untuk membandingkannya berdasarkan konsep konvensional dan syariah karena saat ini banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim yang masih mengacu pada teori ala Barat. Artikel ini mencoba mengupasnya dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Baik konsep penganggaran dalam konvensional maupun Islam pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, namun Islam memiliki norma dan etika yang lebih mengikat secara syariat. Karena makna kesejahteraan di dalam Islam tak hanya untuk dunia namun juga akhirat maka apapun yang dilakukan semestinya mengacu pada hukum-hukum syariat Islam.

Keywords: kebijakan publik Islam, alokasi anggaran negara, anggaran syariah

PENDAHULUAN

Institusi keuangan syariah dewasa ini sudah mulai berkembang, namun pembahasan yang lebih mendalam tentang pengelolaan keuangan negara berbasis syariah masih belum banyak mendapat perhatian. Banyak negara berpenduduk mayoritas Muslim yang masih menggunakan sistem keuangan konvensional, padahal panutan umat Islam yakni Nabi Muhammad SAW pernah menjadi seorang pemimpin negara. Pengalaman dan ajaran Rasulullah SAW ini semestinya dapat dijadikan contoh. Mengkaji kembali sejarah, keuangan publik Islam dan kebijakan fiskal ini pada awal pemerintahan

Rasulullah SAW belum banyak berperan terhadap ekonomi.¹ Seiring dengan perkembangan Islam, Rasulullah SAW mulai mengambil beberapa kebijakan untuk memperkuat pemerintahan.

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim saat ini menerapkan sistem perekonomian ganda (*dual economic system*) yang mengombinasikan sistem keuangan konvensional dan syariah. Hal ini terutama dapat dilihat dari kehadiran lembaga keuangan syariah di tengah-tengah lembaga-lembaga keuangan konvensional yang sudah ada sebelumnya. Ruang lingkup keuangan di Indonesia secara umum diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 dibagi dalam pengelolaan moneter, pengelolaan fiskal, dan pengelolaan kekayaan negara. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah supaya keseimbangan yang dinamis antara jumlah uang yang beredar dengan barang dan jasa yang tersedia di masyarakat dapat diwujudkan.² Adapun kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan penerimaan (pendapatan) dan pengeluaran (belanja).³ Anggaran negara yang akan dibahas dalam artikel ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan merupakan kajian teoritis dari sumber-sumber referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti⁴, dalam artikel ini adalah anggaran negara. Berbagai publikasi dari beberapa situs resmi pemerintah juga dikumpulkan untuk melengkapi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Anggaran Negara

Anggaran negara adalah dokumen yang memuat perkiraan penerimaan dan pengeluaran serta perincian kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan negara yang berasal dari pemerintah untuk jangka waktu satu tahun dan meliputi beberapa unsur⁵. Konsep anggaran merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang memiliki dua sisi, penerimaan dan pengeluaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan tentang dasar pendekatan penganggaran. Terdapat tiga pendekatan di dalam undang-undang ini, yakni: 1) pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (*medium term expenditure framework*); 2) penerapan penganggaran secara terpadu (*unified budget*); dan 3) penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (*performance budget*).

¹ Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publkl Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), hlm. 271.

² Setia Mulyawan, *Manajemen Keuangan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 269-270.

³ Ibid, hlm. 270.

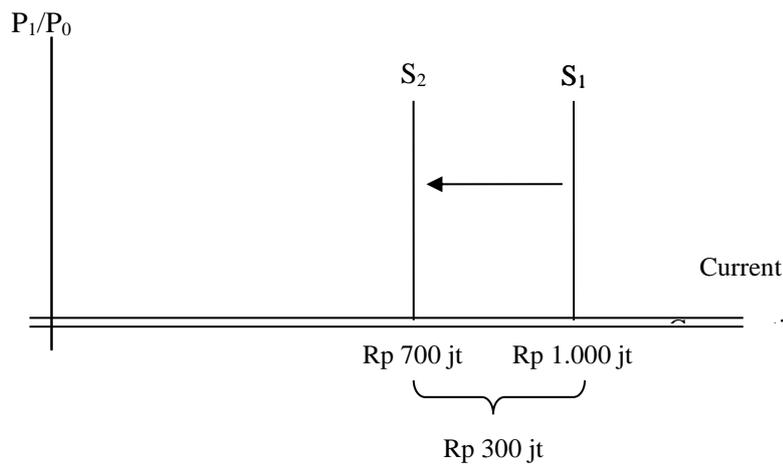
⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 61.

⁵ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2008), hlm. 104.



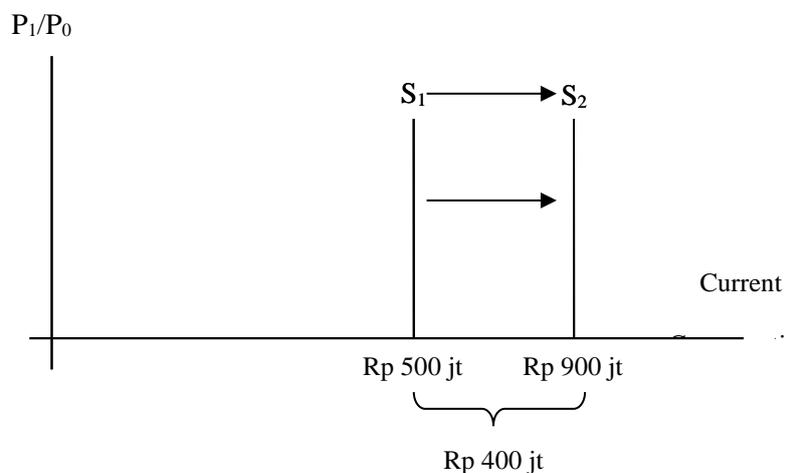
Karim (2014: 272-273) membedakan belanja pemerintah sebagai pembeli besar ini berdasarkan jenisnya sebagai berikut.

1. *Wasteful Spending*, kondisi di mana belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Contohnya, apabila pemerintah mengeluarkan biaya sebesar Rp 1 miliar untuk transportasi umum ternyata kemudian manfaatnya hanya sebesar Rp 700 juta, maka dapat dikatakan bahwa terjadi wasteful spending sebesar Rp 300 juta. Nilai Rp 300 juta yang hilang akan menggeser kurva penawaran ke kiri (Gambar 1).



Gambar 1. *Wasteful Spending*

2. *Productive Spending* adalah kebalikan dari *wasteful spending* yaitu jika belanja pemerintah memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Contohnya, pembangunan jembatan umum yang membutuhkan biaya sebesar Rp 500 juta kemudian memberikan manfaat sebesar Rp 900 juta, maka terjadi productive spending sebesar Rp 400 juta di mana pengeluaran pemerintah ini akan menggeser kurva penawaran ke kanan (Gambar 2).



Gambar 2. *Productive Spending*



3. *Transfer Payment*, apabila jumlah manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan sama besarnya. Misalnya pemerintah mengenakan pajak untuk digunakan menolong korban bencana alam yang disalurkan melalui Palang Merah Indonesia (PMI) di mana PMI menerima dana sebesar jumlah pajak yang ditarik pemerintah tersebut. Secara grafis tidak ada pengurangan atau penambahan *resources* sehingga kurva penawaran tidak mengalami pergerakan baik ke kiri maupun ke kanan.

Belanja negara sebagai instrumen fiskal berperan dalam menggerakkan perekonomian nasional secara optimal di tengah dinamika perekonomian baik global maupun domestik. Kinerja belanja negara secara umum, baik dalam mendukung program pembangunan maupun antisipasi ketidakpastian, terlihat dari capaian beberapa indikator makro pembangunan.⁶ Gambar 3 merupakan grafik perkembangan belanja anggaran negara berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



Sumber: Kementerian Keuangan RI

Gambar 3. Perkembangan Belanja Negara, 2015 - 2020

Belanja negara berdasarkan sifatnya dapat dibedakan *menjadi temporary spending* dan *permanent spending*.⁷

- a. *Temporary Spending*, merupakan pembiayaan yang hanya dilakukan untuk satu kali waktu saja, misalnya pengeluaran untuk pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain sebagainya.

⁶ Kementerian Keuangan RI, 2019, Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Jakarta: Kementerian Keuangan RI, hlm. 3-1.

⁷ Adiwarmanto A. Karim, 2014, Ekonomi Makro Islami, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 273

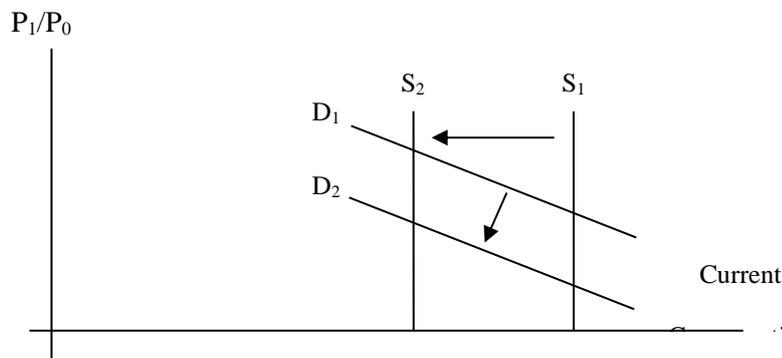


- b. *Permanent Spending*, merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus dalam periode tertentu, misalnya biaya untuk pemeliharaan jalan raya yang harus dikeluarkan setiap tahunnya.

Program pembiayaan pemerintah akan dapat kita ketahui pengaruhnya dengan menggabungkan jenis pengeluaran (*wasteful spending*, *productive spending*, dan *transfer payment*) dan sifat pengeluaran tersebut (*temporary spending* dan *permanent spending*).⁸

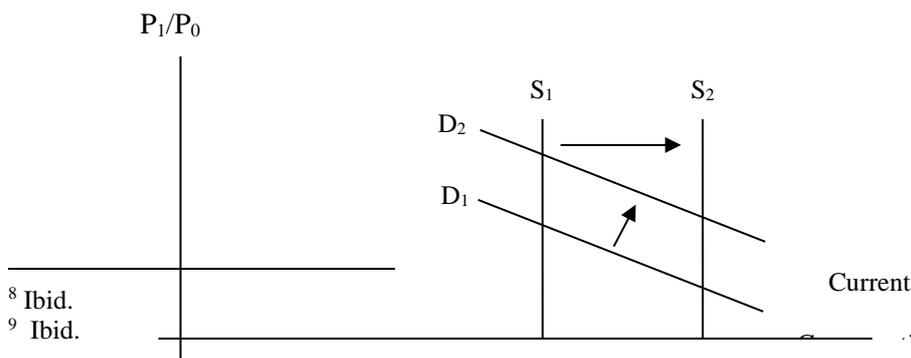
Pengaruh program pemerintah terhadap pengeluaran secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut.⁹

1. *Wasteful Spending* dengan sifat pengeluarannya yang temporer akan mengakibatkan kurva penawaran agregat (AS) dan permintaan agregat (AD) bergeser ke kiri, namun pergeseran AS lebih besar daripada pergeseran AD (Gambar 4).



Gambar 4. *Wasteful Spending* dan *Temporary Spending*

2. *Productive Spending* dengan sifat pengeluaran yang temporer, akan mengakibatkan kurva AS dan AD bergeser ke kanan, namun pergeseran kurva AS lebih besar daripada pergeseran AD (Gambar 5.).



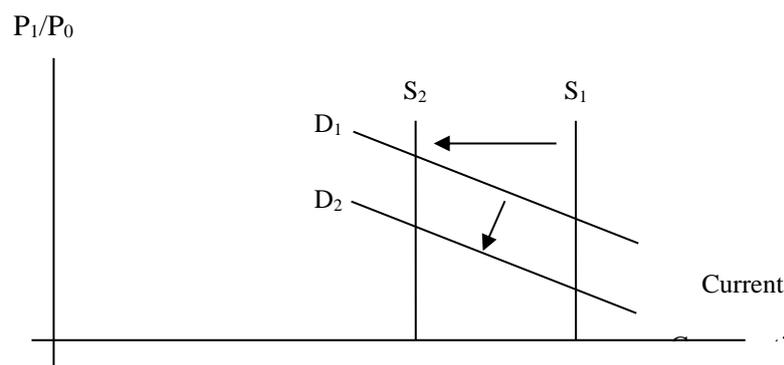
⁸ Ibid.

⁹ Ibid.



Gambar 5. *Productive Spending* dan *Temporary Spending*

3. *Transfer Payment* dengan sifat pengeluaran yang temporer, kurva AS tidak bergerak (bergeser), sedangkan pergerakan kurva AD tergantung pada *Marginal Propensity to Consume* (MPC) masing-masing pihak. Jika MPC keduanya sama besar, maka tidak akan terjadi pergerakan kurva AD.
4. *Wasteful Spending* dengan sifat pengeluaran *permanent* apabila digabungkan maka besarnya pergerakan kurva AS akan sama dengan besarnya pergerakan kurva AD. Ilustrasi grafis ini menunjukkan jenis pengeluaran (Gambar 6).



Gambar 6. *Wasteful Spending* dan *Permanent Spending*

Konsep Pengeluaran Negara dalam Ekonomi Konvensional

Kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure* (Nasution, 2006: 203). Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal selalu berkaitan dengan keputusan-keputusan pemerintah dalam menghimpun dan membelanjakan anggaran negara.



Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pandangan perspektif konvensional memiliki beberapa instrumen (alat) dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan¹⁰, antara lain:

1. Melakukan Bisnis

Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti halnya perusahaan lain, dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara.

2. Pajak

Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Pajak juga dibebankan oleh produsen kepada konsumen dengan menaikkan harga barang/jasa.

3. Meminjam Uang

Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapat informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar utang yang dipinjam hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus.

Terdapat 2 macam pendekatan yang dipakai dalam melakukan penyusunan anggaran¹¹, yaitu anggaran tradisional dan anggaran *New public management* (NPM).

1. Anggaran Tradisional

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat beberapa ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu:

- a) Cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan *incrementalism* yang berarti membuat anggaran dengan melakukan penambahan dan penurangan anggaran tahun sebelumnya tanpa mengkaji lebih dalam. Cara ini dapat menyebabkan kesalahan yang berkelanjutan dan juga tidak menjamin tidak terpenuhinya kebutuhan yang riil.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 255-257.

¹¹ Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 50



- b) Struktur dan susunan anggaran yang bersifat *line-item*, anggaran yang dibuat berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang tidak memungkinkan untuk menghilangkan poin-poin penerimaan atau pengeluaran yang sudah tidak relevan untuk periode sekarang, sehingga kinerja penilaian hanya bertolak ukur pada ketaatan menggunakan dana yang diusulkan saja.
- c) Cenderung sentralistis, penyiapan anggaran dilakukan secara terpusat dan informasinya tidak memadai, maka penilaian kinerja tidak maksimal dan akan mengakibatkan kesenjangan anggaran.
- d) Bersifat spesifikasi, pembuatan anggaran yang fokus, maka dibuatlah terpisah antara pengeluaran operasional dan pengeluaran modal.
- e) Tahunan Untuk proyek investasi, pembuatan anggaran tahunan terlalu pendek, sehingga mengakibatkan muncul praktek-praktek yang diinginkan seperti korupsi dan kolusi.
- f) Menggunakan prinsip anggaran bruto, membuat anggaran yang dibuat kurang sistematis, karena jumlahnya masih kotor dan seharusnya jumlah bersih.

2. Anggaran *New public management* (NPM)

Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran dibandingkan dengan pendekatan tradisional. Ciri-ciri pendekatan ini adalah¹²: a) Komprehensif /komparatif, b) Terintegrasi dan lintas departemen, c) Proses pengambilan keputusan yang rasional, d) Berjangka panjang, e) Spesifikasi tujuan dan penigkatan prioritas, f) Analisis *total cost and benefit* (termasuk *opportunity cost*), g) Berorientasi *input, output* dan *outcome*, h) Adanya pengawasan kinerja.

Ada beberapa teknik yang dikembangkan dalam pendekatan anggaran New Public Management (NPM) yaitu:

- a) Sistem Anggaran Kinerja 49 Merupakan sistem yang mencakup penyusunan program sekaligus dengan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan organisasi sektor publik.
- b) Sistem *Zero Based Budgeting* (ZBB) Teknik penyusunan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini, bukan pedoman pada anggaran yang sudah dibuat tahun lalu. Diasumsikan, bukan berpedoman pada anggaran yang sudah dibuat tahun lalu. Diasumsikan anggaran dimulai dari nilai 0.
- c) Sistem *Planning, Programing, dan Budgeting* (PPBS) Teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada keluaran dan tujuan dengan menekankan pada pengalokasian sumber daya. Sistem anggaran PPBS ini mendasarkan program dengan cara mengelompokkan aktivitas. PPBS adalah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik.

¹² Mohamad Mahsun, dkk, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, (Yogyakarta: BPFE, 2013), hlm. 45



Sebuah penelitian¹³ yang mengambil kasus di Indonesia menemukan bahwa tingkat implementasi anggaran dipengaruhi oleh faktor-faktor kepemimpinan (yaitu masa jabatan, masa kerja dan usia walikota) dan proporsi pengeluaran modal. Tingkat implementasi anggaran relatif lebih rendah ketika walikota berada di masa jabatan kedua, berada di tahun-tahun awal masa jabatan lima tahun dan berusia di atas 60 tahun. Proporsi pengeluaran modal yang lebih tinggi juga mengurangi tingkat implementasi anggaran. Implementasi anggaran yang lebih lemah dapat disebabkan oleh dua alasan: 1) implementasi program yang tidak efektif di mana walikota gagal melaksanakan program atau 2) implementasi program yang efisien di mana walikota menggunakan lebih sedikit dana untuk melaksanakan program mereka. Kedua alasan ini akan menghasilkan realisasi anggaran yang lebih rendah pada akhir tahun fiskal. Namun, harus ada batas tertentu terhadap beberapa pemerintah daerah yang efisien dan berhasil dalam mengimplementasikan program dengan sumber daya keuangan yang lebih sedikit, yang mengarah pada realisasi anggaran yang lebih rendah.

Konsep Pengeluaran Negara dalam Ekonomi Islam

Institusi keuangan negara dalam Islam mengacu pada sejarah peradaban Islam yang dimulai dari masa pemerintahan Rasulullah SAW, khulafaur rasyidin, hingga jatuhnya dinasti terakhir Utsmani di Turki. Berdasarkan sejarah, hanya ada satu bentuk institusi keuangan negara dalam Islam yaitu baitul mal. Rasulullah SAW dan empat khulafaur rasyidin secara umum melakukan dua kebijakan untuk mengembangkan ekonomi serta meningkatkan partisipasi kerja dan produksi.¹⁴

- ✓ *Pertama*, mendorong masyarakat untuk memulai aktivitas ekonomi tanpa dibiayai oleh baitul mal.
- ✓ *Kedua*, kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan Rasulullah dan khulafaur rasyidin dengan mengeluarkan dana baitul mal.

Kebijakan pengeluaran dana baitul mal (keuangan negara) pada masa Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin lebih banyak diperuntukkan demi kemaslahatan umat seperti penyebaran agama Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial.

Karim (2014: 276) membagi sumber-sumber pengeluaran negara primer dan sekunder yang berhubungan dengan kemasyarakatan pada zaman Rasulullah SAW dan empat khalifah (Tabel 1).

¹³ Fuad Rakhman, Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector, *Asian Review of Accounting*, Vol. 27 No. 2, 2019, Pp. 162-176.

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 275.



Tabel 1. Sumber-sumber Pengeluaran Negara pada Masa Rasulullah SAW dan Empat Khalifah

Primer	Sekunder
<ul style="list-style-type: none"> • Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. • Penyaluran zakat dan uhsr kepada yang berhak menerima menurut syara'. • Pembayaran gaji untuk wali, qadi, guru, imam, muadzin, dan pejabat negara lainnya. • Pembayaran upah para sukarelawan. • Pembayaran utang negara. • Bantuan untuk musafir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah. • Hiburan untuk para delegasi keagamaan. • Hiburan untuk para utusan suku dan negara serta biaya perjalanan mereka. • Hadiah untuk pemerintah negara lain. • Pembayaran untuk pembebasan kaum Muslimin yang menjadi budak. • Pembayaran denda atas mereka yang terbunuh secara tidak sengaja oleh pasukan kaum Muslimin. • Pembayaran utang orang yang meninggal dalam keadaan miskin. • Pembayaran tunjangan untuk orang miskin. • Tunjangan untuk sanak saudara Rasulullah SAW (80 butir kurma dan 80 butir gandum untuk setiap istrinya). • Persediaan darurat.

Sumber: Karim, 2014: 276.

Enam prinsip umum yang dijabarkan oleh Chapra (dalam Karim, 2014: 276) dapat digunakan untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten tentang belanja publik yang dilakukan oleh pemerintah.

1. Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah kesejahteraan rakyat.
2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan di atas penyediaan rasa tenteram.
3. Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus lebih diutamakan di atas kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
4. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan publik dan pengorbanan ataupun kerugian yang lebih besar dapat dihindarkan dengan memilih bentuk kerugian yang lebih kecil.
5. Siapa pun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.



6. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat terpenuhi merupakan suatu kewajiban untuk pengadaannya.

KESIMPULAN

Islam memberikan banyak penekanan pada peran pengeluaran pemerintah dalam mencapai kesejahteraan bangsa. Pemerintah tidak bebas menangani uang publik seperti yang diinginkannya. Uang publik harus dikeluarkan untuk mencapai tujuan negara Muslim. Tugas pemerintah di negara Muslim seperti yang dicontohkan oleh Khalifah Umar, bukan untuk menghambur-hamburkan uang publik, tetapi menggunakannya untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Al-Mansour menyatakan bahwa uang publik tidak boleh dibelanjakan dalam konsumsi mewah tetapi harus dibelanjakan untuk memberikan pertahanan, keamanan, meningkatkan standar hidup rakyat dengan menyediakan akomodasi, amunitas yang diperlukan, serta menjaga jiwa dan harta mereka.

Pengeluaran publik harus digunakan untuk mencegah kondisi inflasi dan resesi. Jika inflasi disebabkan oleh peningkatan permintaan agregat, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi. Sedangkan jika inflasi terjadi karena kekurangan dalam hal produksi, maka pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk memperluas produksi. Saat ini, banyak negara Muslim mengalami kondisi inflasi karena terus-menerus boros dalam pengeluaran pemerintah, terutama pengeluaran terkait keamanan dan pengeluaran gaji pejabat. Ini jelas bertentangan dengan kendala yang diberikan oleh Islam tentang bagaimana uang publik harus dibelanjakan.

Penguasa dan badan pengatur pada umumnya harus menjadi preseden bagi seluruh negara dalam mengambil uang publik sekecil-kecilnya dan tidak menetapkan upah mereka di luar kemampuan negara jika tidak mereka akan menghasilkan lebih banyak tuntutan upah dan kondisi inflasi. Proyek-proyek pembangunan akan terhambat dan pembangunan berkelanjutan untuk pembiayaan defisit juga akan berdampak buruk pada neraca perdagangan karena meningkatnya permintaan impor. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang terus meningkat, banyak pemerintah menggunakan pajak untuk konsumsi, terutama untuk keperluan yang harganya tidak elastis, sehingga menambah gelombang inflasi.



Daftar Pustaka

- Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoretis dan Sejarah, Cetakan ke-3*. Jakarta: Prenadamedia Grup. 2019.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- _____. *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Katsir, Ibnu. *Al-Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafaur Rasyidin Edisi Indonesia*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Kementerian Keuangan RI. *Nota Keuangan beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI. 2019.
- Mahsun, Mohamad, dkk. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF. 2013.
- Mulyawan, Setia. *Manajemen Keuangan*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Rakhman, F. Budget implementation in a risky environment: evidence from the Indonesian public sector, *Asian Review of Accounting*, Vol. 27 No. 2, Pp. 162-176, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sujarweni, Wiratna. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.

